

## PENGEMBANGAN SEKOLAH INKLUSIF DENGAN MENGUNAKAN INSTRUMEN *INDEKS FOR INCLUSION*

**Muhammad Nurrohman Jauhari**

Program Studi PG-PAUD

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

[muhammadnurrohmanjauhari@yahoo.co.id](mailto:muhammadnurrohmanjauhari@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

Inclusive education is to provide education system that provides opportunities for all learners who have the disorder and have intelligence and special talents to participate in education or learning in an educational setting together with the learners in general. The problems that occurred in the implementation of inclusive education include the acceptance of students with special needs; identification and assessment; lack of understanding of teachers to the school curriculum inclusive; fields of energy, duty and authority; classroom management system; learning process; Facilities and infrastructure; the understanding of the school and the community about inclusive schools and children with special needs. To address the issue of implementation of inclusive schools using instruments Index for Inclusion as an effort to develop a suitable school with inclusive value in terms of three dimensions, namely: (1) the dimensions of culture (creating inclusive cultures), (2) the dimensions of policy (producing inclusive policies) and (3) the dimensions of practice (evolving inclusive practices). Each dimension is divided into two sections. namely: cultural dimension consists to build a community (community building), and build inclusive values (establishing inclusive values). Dimension policy consists of the development section the place for all (developing setting for all) and implement support for diversity (organizing support for diversity). While the dimensions of the practice consist of sections to learn and play together (orchestrating play and learning) and mobilization of resources (Mobilizing resources.)

**Key Word:** *inclusive school, instumentIndex for Inclusion*

### PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. (Kemdikbud, 2011).

Perkembangan sejarah pendidikan inklusif di Indonesia dimulai tahun 1980 yang dinamakan program terpadu sebagai pendidikan untuk semua, akan tetapi dalam menjalankan program terpadu mempunyai masih banyak kekurangan dalam implementasinya sehingga program tidak dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya perkembangan dalam dunia pendidikan maka pada tahun 2004 diselenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen '*Indonesia menuju pendidikan inklusif*'. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi yang menghasilkan Rekomendasi Bukit tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Ada beberapa persyaratan yang dimaksud diantaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus, mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan

mempunyai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Penyelenggara juga harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar biasa (SLB) ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus (Suparno, dkk, 2007:71-72). Pada tahun 2008, ada 925 sekolah inklusif di Indonesia yang terdiri dari 790 sekolah mengakui siswa dengan kebutuhan khusus dan 135 sekolah dengan dipercepat program untuk berbakat dari TK hingga sekolah dengan tingkat tertinggi (Direktorat Pendidikan Khusus dikutip dalam Sunardi *et all*, 2011).

Pada kondisi saat ini banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, permasalahan yang terjadi banyak ditemukan sekolah-sekolah penyelenggara sekolah inklusif belum memahami sepenuhnya tentang konsep-konsep yang mendasari implementasi dalam sekolah masing-masing. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan dalam penyaringan peserta didik dalam memasuki sekolah inklusi karena kurangnya pemahaman sekolah dan pengambil kebijakan dalam menerapkan identifikasi dan asesmen yang baku, kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusif. Dalam bidang ketenagaan masih kurangnya pemahaman warga

sekolah dalam menjalankan tugas dan wewenang, pada proses pembelajaran sekolah masih belum melaksanakan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Sarana prasarana anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif juga masih banyak ditemui kekurangan serta sosialisasi sekolah tentang sekolah inklusif pada warga sekolah dan warga masyarakat masih belum dilakukan sehingga masih ada ditemukannya diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (*toward inclusive education*), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam pendidikan inklusif yang terjadi saat ini berbagai pihak harus melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap sekolah penyelenggara inklusif dengan menggunakan instrumen *Index for Inclusion* sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah yang sesuai dengan *inclusive value* yang dapat dilihat dari 3 segi antara lain : segi budaya dengan membangun masyarakat dan menetapkan nilai-nilai yang inklusif, segi kebijakan memberikan kebijakan dalam mengembangkan *education for all* dan

dan mengelola dukungan untuk keberagaman, segi praktek dengan mengelola proses pembelajaran dan mengembangkan sumber daya manusia atau warga sekolah dalam memahami nilai-nilai yang inklusif untuk menghilangkan diskriminatif pada anak berkebutuhan khusus.

*Index for Inclusion* merupakan instrumen yang mendukung sekolah untuk mengembangkan sebagai sekolah inklusif dan guru inklusif. *Index for Inclusion* digunakan di banyak negara di dunia sebagai instrumen yang cocok untuk pengembangan sekolah inklusif dan dokumen disesuaikan dan telah mulai digunakan di Kosovo juga sejak tahun 2007, dengan dukungan dari *Save the Children*. *Index for Inclusion* merupakan bagian dari rencana strategis untuk pengaturan pendidikan inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, *Index for Inclusion* mulai dilaksanakan oleh *Save the Children* pada tahun 2006 di dua sekolah dari Kotamadya Prizren ("Ibrahim Fehmiu" dan "Haziz Tola"). Kemudian, pada tahun 2010, *Save the Children* menandatangani Nota Kesepahaman dengan MEST, terkait untuk pelaksanaan *Index for Inclusion* (Zabeli & Lulaver, 2014).

Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bermutu, memerlukan proses perbaikan yang berkelanjutan dari setiap instrumen *Index for Inclusion* yang harus dilakukan. Pendidikan inklusif dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut dengan *Index for*

*Inclusion. Index for Inclusion* ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi praktek (*evolving inclusive practices*). Setiap dimensi dibagi dalam dua seksi yaitu: Dimensi budaya terdiri atas seksi membangun komunitas (*building community*), dan seksi membangun nilai-nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain bersama (*orchestrating play and learning*) dan seksi mobilisasi sumber-sumber (*mobilizing resources.*).

## PEMBAHASAN

### 1. Kajian tentang *Index for Inclusion*

#### a. Pengertian *Index for Inclusion*

Indeks adalah dokumen praktis, yang menunjukkan apa yang dikhususkan pada semua aspek pengaturan. Indeks menyediakan proses yang mendukung evaluasi diri dan pengembangan, yang dibangun di atas pengetahuan dan pandangan praktisi, anak-anak, orang muda, orang tua/wali, anggota lain dari masyarakat sekitarnya serta mereka yang bekerja di pengaturan. Pendekatan mendukung ini untuk meningkatkan pengaturan menawarkan alternatif dalam

pemeriksaan. Indeks dapat membantu setiap orang dalam pengaturan untuk menemukan langkah selanjutnya untuk menjadi lebih inklusif (Booth T, Ainscow M, & Kingston D, 2006).

*Index for Inclusion* menurut Ainscow & Booth (2011) adalah sebuah contoh dari pengembangan, alat evaluasi diri yang telah dirancang khusus untuk mendukung dan membantu dengan proses pengembangan pendidikan inklusif. Indeks ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lembaga individu dan dimaksudkan untuk mendukung refleksi kritis dan tindakan melalui proses evaluasi diri dan evaluasi (Avau *et al*, 2012).

#### b. Dimensi Indeks

Dimensi dalam *Index for Inclusion* mencakup 3 dimensi, yaitu (Booth T, Ainscow M & Kingston D, 2006):

##### 1. Dimensi A Menciptakan Budaya Inklusif

Dimensi ini tentang menciptakan sebuah jaminan, penerimaan, kolaborasi, stimulasi komunitas, dimana setiap orang merasa dihargai. Nilai-nilai inklusif diberikan dan disampaikan kepada semua pelaksana, anak-anak, direksi pimpinan/pemerintah dan orang tua atau wali. Prinsip dan nilai-nilai dalam keputusan panduan budaya inklusif tentang kebijakan dan praktik waktu ke

waktu. Sehingga perkembangan akan terus berlanjut.

## 2. Dimensi B Menghasilkan Kebijakan Inklusif

Pada dimensi inklusi ini menyebarkan semua rencana untuk pengaturan. Kebijakan partisipasi kepada anak-anak dan praktisi saat mereka bergabung pada keadaan yang terkait untuk menjangkau semua anak pada suatu tempat dan meminimalkan penekanan eksklusi. Semua pengaturan mengarahkan kepada strategi perubahan inklusi. Support merupakan bagian dari aktifitas yang meningkatkan kapasitas dalam respon menghadapi perbedaan.

## 3. Dimensi C Mengembangkan Praktek Inklusif

Dimensi ini adalah tentang mengembangkan aktivitas yang mencerminkan kepada budaya dan kebijakan inklusif. Aktivitas dibuat untuk merespon terhadap perbedaan pada anak-anak dan remaja yang berada pada suatu lingkungan komunitas. Anak-anak didorong untuk terlibat aktif, mampu menggambarkan pengetahuan dan pengalaman mereka diluar. Praktisi mengidentifikasi sumber materi dari masing-masing mereka, manajemen pemerintah, anak-anak dan remaja, orang tua atau wali, dan komunitas setempat yang dapat menggerakkan support permainan, pembelajaran, dan partisipasi.

Setiap dimensi terbagi menjadi 2 bagian untuk lebih lanjut dapat berfokus terhadap apa yang lebih dibutuhkan dalam meningkatkan aktifitas. Dimensi dan bagian tersebut terdiri atas kerangka konsep untuk menyusun pengembangan rencana dan dapat menjadi pedoman. Pengaturan dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpindah kearah yang lebih progresif pada area ini dan dapat menggunakan indicator atau pertanyaan untuk menolong lebih spesifik terhadap apa yang mereka ingin lakukan (Booth T, Ainscow M & Kingston D, 2006). Setiap bagian terdiri atas beberapa indikator. Hal ini untuk mengaspirasikan bahwa betapa pentingnya aspek penagturan dalam memulai peninjauan yang luas terhadap inklusi. Dari masing-masing indikator kemudian dibagi atas beberapa pertanyaan (Lampiran) (Booth T, Ainscow M & Kingston D, 2006). *Index for Inclusion* terdiri dari beberapa bagian, dengan masing-masing dari mereka mengandung 5-11 indikator. Setiap indikator merupakan aspek penting untuk sekolah meskipun beberapa lebih spesifik terhadap beberapa masalah, seperti kaum minoritas, anak-anak dengan kebutuhan khusus, tercermin dalam semua indikator. setiap indikator telah dijelaskan oleh sejumlah

pertanyaan. Situasi saat ini di sekolah, memberikan ide-ide tambahan untuk kegiatan pembangunan, dan berfungsi sebagai kriteria kemajuan (Zabeli N & Lulavere B, 2014).

### **c. Proses Indeks**

Proses indeks terdiri dari 5 fase (Booth T, Ainscow M & Kingston D, 2006):

1. Persiapan dengan Indeks,
  - a) Menetapkan sebuah rencana dalam kelompok
  - b) Meninjau terhadap pendekatan sebuah perencanaan
  - c) Meningkatkan kesadaran terhadap indeks
  - d) Menyelidiki panduan pengetahuan yang telah ada oleh pedoman konsep dan kerangka perencanaan
  - e) Memperdalam penyelidikan menggunakan indikator dan pertanyaan
  - f) Mempersiapkan untuk bekerja dengan orang lain.
2. Mendapatkan Informasi tentang sekolah,
  - a) Mengeksplor pengetahuan dan ide dari praktisi dan manajemen ketua atau komite
  - b) Mengeksplor pengetahuan dan ide dari anak-anak atau remaja
  - c) Mengeksplor pengetahuan dan ide dari orang tua/ wali

dan anggota dari komunitas setempat

- d) Memutuskan prioritas pengembangan
3. Menyusun rencana sekolah untuk pendidikan inklusif.
  - a) Meninjau prioritas untuk kerangka perencanaan
  - b) Menempatkan yang diprioritaskan kedalam rencana pengembangan
4. Mendukung Pengembangan
  - a) Menempatkan perencanaan menjadi sebuah aksi
  - b) Mempertahankan pengembangan
5. Meninjau proses Panduan - Evaluasi.
  - a) Meninjau dan mencatat kemajuan
  - b) Meninjau kerja ke dalam indeks
  - c) Melanjutkan proses indeks.

### **d. Pendekatan dalam mengembangkan Indikator *Index for Inclusion***

Pendekatan untuk mengembangkan indikator ini dapat berupa:

1. Membentuk tim koordinasi partisipatori.
2. Menyiapkan materi untuk menstimulasi diskusi yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan tentang inklusi dari berbagai dokumen internasional, studi kasus, dan definisi pendidikan inklusif.
3. Menggunakan pendekatan partisipatori untuk membuat

daftar nilai-nilai, keyakinan dan prinsip inti yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

4. Mendapatkan opini dari kelompok-kelompok yang paling termajinalisasi dan tersisihkan: perempuan, anak-anak, penyandang cacat, orang usia lanjut.
5. Masukkan kedalam kategori sederhana misalnya isu kebijakan, kurikulum, pelatihan, pembangunan sekolah dan lain-lain yang kemudian dapat diubah dan disesuaikan kembali.
6. Didalam setiap kategori tersebut, deskripsikan perilaku, keterampilan, pengetahuan dan perubahan konkret yang akan menunjukkan nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip yang benar dipraktekkan.

## **2. Kajian tentang Pendidikan Inklusi**

### **a. Pengertian Pendidikan Inklusi**

Inklusi dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan berprinsip untuk bertindak dalam pendidikan dalam masyarakat yang meliputi komitmen seperti gagasan-gagasan bahwa setiap kehidupan dan kematian mempunyai nilai yang sama. Inklusi meminimalkan semua hambatan dalam perbedaan dan persamaan pada anak-anak dan remaja dengan menghargai semua perbedaan diantara orang-orang, menghindari penempatan nilai

yang lebih tinggi pada beberapa anak-anak karena kemajuan mereka dalam perkembangan fisik dan pencapaian, mengakui bahwa anak-anak berbeda satu sama lain tidak berarti mereka semua harus terlibat dalam tugas individu tetapi memahami cara-cara beragam diantara mereka melalui pengalaman bersama (Booth T, Ainscow M, & Kingston D, 2006).

Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang sesuai bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya (Kemdikbud, 2011).

### **b. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip, sebagai berikut (Kemdikbud, 2011):

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua

anak dan menghargai perbedaan.

2. Prinsip keberagaman. Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik.
3. Prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didik.
4. Prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
5. Prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

### **c. Implikasi Manajerial Pendidikan Inklusif**

Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut (Kemdikbud, 2011):

1. Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana serta penataan lingkungan.

2. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.
3. Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik.
4. Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
5. Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.

### **d. Implementasi Pendidikan Inklusi**

Dalam merencanakan pendidikan inklusif, tidak cukup dengan memahami konsepnya saja. Sebuah rencana juga harus

realistis dan tepat. Pengalaman pendidikan inklusif yang sukses menunjukkan bahwa ada 3 faktor penentu utama yang perlu diperhatikan agar implementasi pendidikan inklusif bertahan lama, yaitu :

1. Adanya kerangka yang kuat-rangka: Pendidikan inklusif perlu didukung oleh kerangka nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip, dan indikator keberhasilan. Ini akan berkembang seiring dengan implementasinya dan tidak harus 'disempurnakan' sebelumnya. Tetapi jika pihak-pihak yang terlibat mempunyai konflik nilai-nilai dan lain-lain, dan jika konflik tersebut tidak diselesaikan dan disadari, maka pendidikan inklusif akan mudah ambruk.
2. Implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokalnya: Pendidikan inklusif bukan merupakan suatu cetak biru. Satu kesalahan utama adalah asumsi bahwa solusi yang diekspor dari suatu budaya/konteks dapat mengatasi permasalahan dalam budaya/konteks lain yang sama sekali berbeda. Lagi-lagi, berbagai pengalaman menunjukkan bahwa solusi harus dikembangkan secara lokal dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal; jika

tidak, solusi tersebut tidak akan bertahan lama.

3. Partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi diri yang kritis "darah kehidupannya": Pendidikan inklusif tidak akan berhasil jika hanya merupakan struktur yang mati. pendidikan inklusif merupakan proses yang dinamis, dan agar pendidikan inklusif terus hidup, diperlukan adanya monitoring partisipatori yang berkesinambungan, yang melibatkan semua stakeholder dalam refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif.

## **SIMPULAN**

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusif meliputi penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus; identifikasi dan asesmen; kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum sekolah inklusif; bidang ketenagaan, tugas dan wewenang; sistem pengelolaan kelas; proses pembelajaran; Sarana dan prasarana; pemahaman warga sekolah dan masyarakat tentang sekolah inklusif dan anak berkebutuhan khusus dengan cara menggunakan instrumen *Index for Inclusion* sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah yang sesuai dengan *inclusive value* ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*),

dan (3) dimensi praktek (*evolving inclusive practices*) agar penyelenggara sekolah inklusif dapat memonitoring dan mengevaluasi sekolah masing-masing untuk mengembangkan, menjadi tolak ukur dan menerapkan nilai-nilai inklusif yang tanpa diskriminasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Avau G, P.M.F.W.K.C.e.a., 2012. *Analysis of the use and value of the Index for Inclusion (Booth& Ainscow 2011) and other instruments to assess and develop inclusive education practice in P2i partner countries.* Brussels/Tilburg, Fontys OSO.: EASPD.

Booth T, Ainscow M, Kingston D , 2006. *Index for inclusion: Developing play, learning and participation in early years and childcare.* Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009).* Jakarta: Direktorat PPK-LK, Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sunardi, Mucawir Y, Gunarhadi, Priyono, & John LY, June 2011. *The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia. Excellence in Higher Education, Vol. 2 (No. 1), pp.pp. 1-10.*

Suparno, dkk. (2007). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak).* Jakarta: Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional.

Zabeli N & Lulavere B, 2014. *Index For Inclusion: Facts and Opinions.* Prishtina, Kosovo: Save the Children.